

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal dan A. Gimmy Prathama Siswandi. 2015. *Psikologi Korupsi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Adji, Indriyanto Seno. 2016. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Almaududi, 2020. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana : Edisi Revisi*. Semarang : Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Gramedia.
- Danil, Elwi. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Drumbl, Mark A. 2017. *Atrocity, Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge University Press.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fakhrojih, Ikhwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Jakarta : Setara Press.
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2004. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara : Edisi Ketiga*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hatta, Muhammad 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokseumawe : Unimal Press.

Huda, Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo.

Kusuma, I Made Hendra. 2019. *Pembaharuan Kewenangan KPK dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi yang Lebih Berkepastian Hukum*. Denpasar : PT Alumni Bandung.

Manan, Bagir. 1996. *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung : FH Unila.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Mochtar, Zainal Arifin. 2019. *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi)*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

Pompe, Jeremy. 2008 “*Strategi Memberantas Korupsi*”. Transparency International.

Quah, Jon S.T. 2007. *Combating Corruption Singapore-style: Lessons for other Asian countries*, United States of America : University of Maryland.

Renggong, Ruslan. 2015. *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik – Delik di Luar KUHP*. Makassar : Kencana.

Roskiah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianiningsih. 2016. *Pendidikan AntiKorupsi : Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.

Samuel, Geoffrey Samuel. 2014. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Oregon : Hart Publising.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.

Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Hukum Sistem Hukum, Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Susanti, Dwi Siska dan Nadia Sarah, 2016, *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.

_____. 1999. *Etika Politik, Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL/LAPORAN

Alfitri. 2012. “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, 2012.

Alkostar, Artidjo. 2013. “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime”. Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia bagi Hakim Seluruh Indonesia.

A. Nelken. 2004. “Using the Concept of Legal Culture”. *Australian Journal of Legal Philosophy*.

Klittgard, Robert. 1998. “International Cooperation Against Corruption, Finance & Development”. March 1998, Vol. 35 No. 1.

Pomerleau, Claude. 2008. “Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl”. *International Journal on World Peace* Vol. 25, No. 2, June 2008.

Sindar, Ricci Tatengkeng. 2016. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. V/No. 5/Jul/2016.

Tim Analisa dan Evaluasi Hukum BPHN. “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. Jakarta : BPHN.

Wahyuningrum, Kartika Sasi dkk., 2020. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.

Winarno Budyatmojo, Winarno. 2013. “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)”. *Jurnal Yustisia*, Vol. 86, Mei-Agustus 2013.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Informasi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Audit Penyadapan Informasi yang Sah (*Lawful Interception*) Pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Penal Code of Singapore

Criminal Procedure Code of Singapore

Computer Misuse dan Cybersecurity Act of Singapore

Prevention of Corruption Act of Singapore

Telecommunications Act of Singapore

INTERNET

<http://kbbi.web.id/korupsi>.

<http://pubdocs.worldbank.org/en/986461460705141518/Indonesias-Rising-Divide-Bahasa-Indonesia.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/11/11542591/jaksa-kembalikan-berkas-perkara-djoko-tjandra-ke-bareskrim>

<https://news.detik.com/berita/d-5155155/begini-2-klaster-penyidikan-djoko-tjandra-bareskrim-dan-kejagung/>

<https://privacyinternational.org/advocacy-briefing/722/right-privacy-singapore>

<https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=3827>

<https://singaporelegaladvice.com/law-articles/arrestable-or-not-seizable-and-non-seizable-offences-in-singapore>

<https://www.beritasatu.com/nasional/67594-tarik-ulur-nasib-sang-jenderal>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>

<https://www.britannica.com/topic/welfare-state>

<https://www.cpib.gov.sg/about-cpib/our-heritage>

<https://www.cpib.gov.sg/about-cpib/roles-and-functions>

<https://www.cpib.gov.sg/about-us/our-work/organisational-structure>

<https://www.kompasiana.com/danielht/5512e3cea33311de68ba7d53/menengok-kembali-cicak-vs-buaya-jilid-i-dan-menyaksikan-cicak-vs-buaya-jilid-ii-bagian-pertama-dari-dua-tulisan>

<https://www.transparency.org/>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/23/cicak-versus-buaya-jilid-ii-dimulai-i>

